

**BAB IV**  
**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Deskripsi Hasil Penelitian**

**4.1.1 Analisis Aset**

Berdasarkan data pada tabel 4.1 – 4.5 tentang Neraca dari ke-empat Daerah, dapat dihitung rasio keuangan sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Analisis Rasio Keuangan Kota Surabaya

Rasio Keuangan	Tahun Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Lancar	4.20	3.01	3.21	2.34	1.89
Pertumbuhan	0	(1.19)	0.2	(0.87)	(0.45)
Rasio Kas	2.88	2.02	2.15	1.28	0.52
Pertumbuhan	0	(0.86)	0.13	(0.87)	(0.76)
Rasio Cepat	3.93	2.75	2.88	2.03	1.41
Pertumbuhan	0	(1.18)	0.13	(0.85)	(0.62)
Rasio Modal Kerja terhadap total aset	3.3	3	2.9	1.9	1.3
Pertumbuhan	0	0	0	(1)	(1)
Rasio Solvabilitas	94.66	66.89	75.27	69.02	70.43
Pertumbuhan	0	(27.77)	8.38	(6.25)	1.41

Data Diolah Penulis

Tabel 4. 2 Rata-Rata Rasio Keuangan Kota Surabaya 2016 - 2020

Rasio Keuangan	Rata - Rata	Kategori
Rasio Lancar	2.93	Baik
Rasio Kas	1.77	Baik
Rasio Cepat	2.60	Baik
Rasio modal kerja terhadap total aset	2.5	Baik
Rasio Solvabilitas	75.25	Baik

Data Diolah Penulis

#### A. Pemerintah Kota Surabaya

1. Rata-rata rasio likuiditas (Rasio Lancar, Rasio Kas dan Rasio Cepat) Pemerintah Daerah selama lima tahun anggaran (2016–2020) berada dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sakala diatas 1 (satu). sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2016). Meskipun masih dalam kategori baik, namun perlu menjadi perhatian pada tahun 2019 kas Pemerintah Kota Surabaya mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018, dimana kas 2018 tercatat sebesar Rp. 1,224,368,972,265.65 dan kas 2019 tercatat Rp. 828,232,610,715.78. atau turun 67,6%. Sedangkan kas tahun 2020 juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 kas tercatat Rp. 828,232,610,715.78 dan kas 2020 tercatat Rp. 342,164,911,272.53 atau turun 41%.

2. Rata-rata Rasio modal kerja terhadap total aset Pemerintah Daerah selama lima Tahun Anggaran (2016-2020) memiliki nilai sebesar 2.5:1. Ini dapat menjadi salah satu *indicator* bahwa Pemerintah Daerah memiliki tingkat kemampuan untuk memenuhi semua hutang-hutang nya. Selama lima Tahun Anggaran rasio ini paling tinggi tercatat 3.3:1 pada Tahun Anggaran 2016 hal ini dipengaruhi oleh hutang lancar Pemerintah Daerah pada Tahun 2016 sebesar Rp. 393,696,308,636.5 lebih rendah jika di bandingkan hutang lancar Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran

2017. Hal ini terjadi disebabkan peningkatan pada pos pendapatan di terima dimuka naik 84% dan Utang belanja naik 45%.

3. Rata – rata rasio solvabilitas Pemerintah Daerah selama lima Tahun Anggaran (2016-2020) sebesar 75.25. ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah mampu untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Dimana aktiva Pemerintah Kota Surabaya dari Tahun Anggaran 2016-2020 jauh lebih besar dibandingkan total utang yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya di periode yang sama. Dapat dilihat bahwa Tahun Anggaran 2016 menjadi kinerja keuangan tertinggi Pemerintah Kota Surabaya selama periode 2016-2020 hal ini ditunjukkan dengan hasil rasio 94.66. sementara kinerja keuangan terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2017, hal ini ditunjukkan dengan hasil rasio 66.89 dan dipengaruhi oleh jumlah Aset Pemerintah Daerah hanya bertambah sebesar 8% sedangkan Kewajiban Pemerintah Daerah bertambah sebesar 53% jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Secara umum kinerja keuangan Kota Surabaya jika ditinjau dari Analisis Rasio keuangan memiliki kinerja yang baik, dibuktikan dengan Rasio Likuiditas, Rasio modal kerja, dan Rasio Solvabilitas menunjukkan nilai dan *Prosentase* yang baik.

Tabel 4. 3 Analisis Rasio Keuangan Kota Malang

Rasio Keuangan	Tahun Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Lancar	7.52	43.05	42.97	71.13	54.54
Pertumbuhan	0	35.53	(0.08)	28.16	(16.59)
Rasio Kas	5.91	30.84	35.21	61.40	44.10
Pertumbuhan	0	24.93	4.37	26.19	(17.3)
Rasio Cepat	7.26	41.70	41.27	69.49	51.27
Pertumbuhan	0	34.44	(0.43)	28.22	(18.22)
Rasio Modal Kerja terhadap total aset	5.7	8.8	9.1	13.3	10.7
Pertumbuhan	0	3.1%	0.3%	4.2%	(2.6) %
Rasio Solvabilitas	114.20	478.16	459.67	528.38	501.31
Pertumbuhan	0	363.96	(18.49)	68.71	(27.07)

Data Diolah Penulis

Tabel 4. 4 Rata-Rata Rasio Keuangan Kota Malang 2016-2020

Rasio Keuangan	Rata - Rata	Kategori
Rasio Lancar	43.84	Baik
Rasio Kas	35.49	Baik
Rasio Cepat	42.20	Baik
Rasio modal kerja terhadap total aset	9.5	Baik
Rasio Solvabilitas	416.34	Baik

Data Diolah penulis

## B. Pemerintah Kota Malang

1. Rata-rata rasio likuiditas (Rasio Lancar, Rasio Kas dan Rasio Cepat) Pemerintah Daerah selama lima tahun anggaran (2016–2020) berada dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sakala diatas 1 (satu). sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2016). Pada Tahun Anggaran 2020 jumlah Aset

Lancar mengalami penurunan -18% dari Tahun Anggaran 2019 dimana hal ini dikarenakan penurunan Kas Pemerintah Kota Malang sebesar -25% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana kas pada tahun 2019 tercatat sejumlah Rp. 732,518,691,596.23 sedangkan kas tahun 2020 tercatat sejumlah Rp. 552,257,089,862.88.

2. Rata-rata Rasio modal kerja terhadap total aset Pemerintah Daerah selama lima Tahun Anggaran (2016-2020) memiliki nilai sebesar 9.5:1. Ini dapat menjadi salah satu *indicator* bahwa Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi semua hutang-hutangnya. Selama lima Tahun Anggaran rasio ini paling tinggi tercatat 13.3:1 pada Tahun Anggaran 2019, hal ini dipengaruhi oleh aktiva lancar Pemerintah Daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp. 860,429,262,272.04 lebih tinggi jika dibandingkan aktiva lancar Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2018 yang hanya sebesar Rp. 597,996,156,213.51. Hal ini disebabkan peningkatan pada pos kas di Daerah sebesar 51% dan Utang Lancar mengalami penurunan dari Rp. 13,915,474,059.94 pada Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp. 12,096,894,513.23 pada Tahun Anggaran 2019. hal ini disebabkan pada pos Utang Belanja mengalami penurunan -24%.

3. Rata – rata rasio solvabilitas Pemerintah Daerah selama lima Tahun Anggaran (2016-2020) sebesar 416.34. ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah mampu untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Dimana aktiva Pemerintah Kota Malang dari Tahun Anggaran 2016-2020 jauh lebih besar dibandingkan total utang yang dimiliki pada periode yang sama. Dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2019 rasio solvabilitas Pemerintah Kota Malang memiliki nilai tertinggi

selama Tahun Anggaran 2016-2020 yaitu sebesar 525.38 hal ini dipengaruhi oleh penurunan total utang sebesar -13.07% dari Rp. 13,915,474,059.94 pada 2018 menjadi Rp. 12,096,894,513.23 pada 2019. Hal ini terjadi disebabkan oleh penurunan utang belanja dari Rp. 12,672,320,630.78 pada tahun 2018 menjadi Rp. 9,679,341,348.85 atau turun -24%.

Secara umum kinerja keuangan Kota Malang jika ditinjau dari Analisis Rasio keuangan memiliki kinerja yang baik, dibuktikan dengan Rasio Likuiditas, Rasio modal kerja, dan Rasio Solvabilitas menunjukkan Nilai dan *Prosentase* yang baik.

Tabel 4. 5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Malang

Rasio Keuangan	Tahun Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Lancar	16.00	12.71	13.50	14.52	9.19
Pertumbuhan	0	(3.29)	0.79	1.02	(5.33)
Rasio Kas	10.94	8.80	10.88	10.59	6.01
Pertumbuhan	0	(2.14)	2.08	(0.29)	(4.58)
Rasio Cepat	15.07	11.71	12.63	13.36	7.83
Pertumbuhan	0	(3.36)	0.92	0.73	(5.53)
Rasio Modal Kerja terhadap total aset	5.48	6.03	7.02	7.46	6.96
Pertumbuhan	0	0.55 %	0.99 %	0.44 %	(0.77) %
Rasio Solvabilitas	221.12	174.63	166.58	173.32	116.22
Pertumbuhan	0	(46.49)	(8.05)	6.74	(57.1)

Data Diolah Penulis

Tabel 4. 6 Rata-Rata Rasio Keuangan Kabupaten Malang 2016-2020

Rasio Keuangan	Rata – Rata	Kategori
Rasio Lancar	13.18	Baik
Rasio Kas	9.44	Baik
Rasio Cepat	12.12	Baik
Rasio modal kerja terhadap total aset	6.59	Baik
Rasio Solvabilitas	170.37	Baik

Data Diolah Penulis

### C. Pemerintah Kabupaten Malang

1. Rata-rata rasio likuiditas (Rasio Lancar, Rasio Kas dan Rasio Cepat) Pemerintah Daerah selama lima tahun anggaran (2016–2020) berada dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sakala diatas 1 (satu). Meskipun rasio-rasio diatas masih dalam kategori baik namun ada beberapa hal yang harus dicermati, pada tahun 2016 terjadi peningkatan hutang lancar pemerintah dari Rp. 19,883,603,259.21 pada tahun 2017 menjadi Rp. 33,194,079,216.84 atau naik 60%, hal ini disebabkan oleh terjadi kenaikan 105% pada pos utang beban dari Rp. 15,267,732,438.25 pada tahun 2016 menjadi Rp. 31,285,888,254.64 pada tahun 2017. Dan kenaikan pada pos pendapatan diterima dimuka dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar 260,743,835 dan pada tahun 2017 tercatat sebesar 497,212,807.2 mengalami kenaikan 91%.

2. Rata-rata Rasio modal kerja terhadap total aset Pemerintah Daerah selama lima Tahun Anggaran (2016-2020) memiliki nilai sebesar 6.59 :1. Ini dapat menjadi salah satu *indicator* bahwa Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi semua hutang-hutang nya. Selama lima Tahun Anggaran rasio ini paling tinggi tercatat 7.46:1 pada Tahun Anggaran 2019, hal ini dipengaruhi oleh aktiva lancar Pemerintah Daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp. 559,923,007,077.34 lebih

tinggi jika di bandingkan aktiva lancar Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2018 yang hanya sebesar Rp. 527,956,993,266.98. Hal ini disebabkan peningkatan pada pos piutang pendapatan sebesar 34%, pada pos persediaan mengalami peningkatan sebesar 30% dari tahun sebelumnya sedangkan Utang Lancar mengalami penurunan dari Rp. 39,095,722,895.02 pada Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp. 38,568,144,170.31 pada Tahun Anggaran 2019. hal ini disebabkan pada pos Utang Beban mengalami penurunan -18%.

3. Rata – rata rasio solvabilitas Pemerintah Daerah selama lima Tahun Anggaran (2016-2020) sebesar 170.37. ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah mampu untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Dimana aktiva Pemerintah Kabupaten Malang dari Tahun Anggaran 2016-2020 jauh lebih besar dibandingkan total utang yang dimiliki pada periode yang sama. Dapat dilihat bahwa rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun 2016 tercatat memiliki nilai yang lebih tinggi selama Tahun Anggaran 2016-2020 yaitu 221.12, hal ini disebabkan oleh meningkatnya total aktiva sebesar 5% dari Tahun Anggaran 2015 dimana investasi jangka panjang meningkat sebesar 24% dan Aset tetap mengalami peningkatan sebesar 9% dari Tahun Anggaran 2018.

Secara umum kinerja keuangan Kabupaten Malang jika ditinjau dari Analisis Rasio keuangan memiliki kinerja yang baik, dibuktikan dengan Rasio Likuiditas, Rasio modal kerja, dan Rasio Solvabilitas menunjukkan Nilai dan *Prosentase* yang baik.



Tabel 4. 7 Analisis Rasio Keuangan Kota Batu

Rasio Keuangan	Rata - Rata	Kategori
Rasio Lancar	48.96	Baik
Rasio Kas	35.72	Baik
Rasio Cepat	46.99	Baik
Rasio modal kerja terhadap total aset	13	Baik
Rasio Solvabilitas	506.86	Baik

Data Diolah Penulis

Tabel 4. 8 Rata-Rata Rasio Keuangan Kota Batu 2016-2020

Rasio Keuangan	Tahun Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Lancar	124.06	18.94	24.85	44.14	32.81
Pertumbuhan	0	(105.12)	5.91	19.29	(11.33)
Rasio Kas	78.36	13.94	21.89	36.81	27.58
Pertumbuhan	0	(64.42)	7.95	14.92	(9.23)
Rasio Cepat	118.36	18.37	24.10	42.95	31.15
Pertumbuhan	0	(99.99)	5.73	18.85	(11.8)
Rasio Modal Kerja terhadap total aset	7	10	15	18	16
Pertumbuhan	0	(3%)	5%	3%	(2%)
Rasio Solvabilitas	1,764.80	175.47	153.89	238.14	202.01
Pertumbuhan	0	(1,589.33)	(21.58)	84.25	(36.13)

Data Diolah Penulis

#### D. Pemerintah Kota Batu

1. Rata-rata rasio likuiditas Pemerintah Daerah selama lima tahun anggaran (2016–2020) berada dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sakala diatas 1 (satu). Hal ini ditunjukkan dengan nilai sakala diatas 1 (satu). Meskipun rasio-rasio diatas masih dalam kategori baik namun ada beberapa hal yang harus dicermati, pada tahun 2016 terjadi peningkatan hutang lancar pemerintah dari Rp.

935,773,805.33 pada tahun 2016 menjadi Rp. 9,942,085,255.66 atau naik 1,062.45%, hal ini disebabkan oleh terjadi kenaikan 28577% pada pos utang belanja dari Rp. 24,816,000 pada tahun 2016 menjadi Rp. 7,116,553,578.00 pada tahun 2017. Dan kenaikan pada pos utang jangka pendek dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 778,374,472.00 dan pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 2,744,865,011.00 mengalami kenaikan 253%.

2. Rata-rata Rasio modal kerja terhadap total aset Pemerintah Daerah selama lima Tahun Anggaran (2016-2020) memiliki nilai sebesar 13 : 1. Ini dapat menjadi salah satu *indicator* bahwa Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi semua hutang-hutangnya. Selama lima Tahun Anggaran rasio ini paling tinggi tercatat 18:1 pada Tahun Anggaran 2019, hal ini dipengaruhi oleh aktiva lancar Pemerintah Daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp. 372,519,911,108.79 jauh lebih tinggi jika dibandingkan aktiva lancar Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2018 yang hanya sebesar Rp. 308,568,751,529.53. Hal ini disebabkan peningkatan pada pos piutang dana bagi hasil sebesar 556%, pada pos kas di kas daerah mengalami peningkatan sebesar 14% dari tahun sebelumnya. Sedangkan Utang Lancar mengalami penurunan dari Rp. 12,416,926,953.63 pada Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp. 8,439,984,894.18 pada Tahun Anggaran 2019. hal ini disebabkan pada pos utang belanja mengalami penurunan -28%.

3. Rata – rata rasio solvabilitas Pemerintah Daerah selama lima Tahun Anggaran (2016-2020) sebesar 506.86. ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah mampu untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Secara umum kinerja keuangan Kabupaten Malang jika ditinjau dari Analisis Rasio keuangan memiliki kinerja yang baik, dibuktikan dengan Rasio Likuiditas, Rasio modal kerja, dan Rasio Solvabilitas menunjukkan Nilai dan *Prosentase* yang baik.

Berdasarkan data pada Lampiran 5.1 – 5.3 tentang Neraca, dari ke-empat Kota/Kabupaten (Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu & Kabupaten Malang) diperoleh hasil analisis pertumbuhan aset sebagai berikut :

#### A. Aset Pemetintah Kota Surabaya

Aset Pemerintah Kota Surabaya Pada Tahun Anggaran 2016 Tercatat Rp.38,134,603,568,773.1 dan pada Tahun Anggaran 2015 Aset Pemerintah Kota Surabaya tercatat Rp. 38,222,837,005,580.60 atau turun -0.23%. pada Tahun Anggaran 2017 Aset Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan dari Rp.38,134,603,568,773.10 pada Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp.41,176,250,937,320.60 pada Tahun Anggaran 2017 atau sebesar 8% .dan terus mengalami peningkatan hingga Tahun Anggaran 2020 nilai Aset Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp.45,910,335,939,674.

Penurunan ini sejalan dengan penurunan aset lancar kota Surabaya pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 1,654,650,498,205.57 dan pada Tahun Anggaran 2015 tercatat sebesar Rp. 2,082,844,330,268.89 atau turun -20.56%, dimana penurunan *Signifikan* terjadi pada pos Kas di Kas Daerah pada Tahun 2016 tercatat Rp. 994,779,415,849,97 dan pada tahun Anggaran 2015 tercatat Rp 1,257,542,943,377.43 atau turun -21%.

## B. Aset Pemerintah Kota Malang

Pada Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2018 Aset Pemerintah Kota Malang menunjukkan kinerja dilihat dari Aset Selalu bertumbuh disetiap Tahun Anggaran, pada Tahun 2015 Aset Pemerintah Kota Malang tercatat sebesar Rp. 5,526,662,906,695.95 dan pada Tahun Anggaran 2016 Aset Pemerintah Kota Malang tercatat sebesar Rp. 5,909,774,604,328.97 naik 7%. Sampai Tahun Anggaran 2018 Aset Pemerintah Kota Malang terus menunjukkan nilai yang *Positif* dimana pada Tahun Anggaran 2018 Aset Pemerintah Kota Malang tercatat sebesar Rp. 6,396,564,384,412.46 dan Pada Tahun Anggaran 2017 Aset Pemerintah Kota Malang tercatat sebesar Rp. 6,216,978,363,673.12 naik 3%

Namun pada Tahun Anggaran 2019 Aset Pemerintah Kota Malang mengalami sedikit penurunan dari Rp. 6,391,773,190,297.18 pada Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp. 6,396,564,384,412.46 turun -0.07 %, jika dilihat dengan total Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Malang penurunan ini tidak memiliki dampak yang *signifikan*. Karena pada Tahun Anggaran 2020 nilai Aset Pemerintah Kota Malang tercatat mengalami kenaikan kembali dari Rp.6,391,773,190,297.1 Pada tahun 2019 Menjadi Rp.6,498,491,837,328.99 pada tahun 2020 naik 2%.

## C. Aset Pemerintah Kabupaten Malang

Selama Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2018 Aset Pemerintah Kabupaten Malang mencatatkan pertumbuhan yang positif. Pada Tahun Anggaran 2016 Mengalami Pertumbuhan sebesar 5%, pada Tahun Anggaran 2017 tercatat pertumbuhan Asetnya sebesar 18%, pada Tahun Anggaran 2018 8%, pada Tahun Anggaran 2019 tercatat kenaikan jumlah Aset sebesar 0.25%. sedangkan

pada Tahun Anggaran 2020 Aset Pemerintah Kabupaten Malang tercatat mengalami sedikit penurunan sebesar -0.08%

#### D. Aset Pemerintah Kota Batu

Aset Pemerintah Kota Batu pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 tercatat selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun Anggaran 2016 Aset Pemerintah Kota Batu Naik 35% dari Tahun Anggaran sebelumnya, pada Tahun Anggaran 2017 Aset Pemerintah Kota Batu tercatat naik 6%, Pada Tahun Anggaran 2018 Aset Pemerintah Kota Batu tercatat naik 10%, pada Tahun Anggaran 2019 Aset Pemerintah Kota Batu juga tercatat naik sebesar 5%. Namun pada Tahun Anggaran 2020 Aset Pemerintah Kota Batu mengalami penurunan sebesar -2%.

Sementara untuk melihat apakah Aset Pemerintah Daerah mengalami *Overliquid* atau *illiquid* dapat dilakukan analisis proporsi kelompok aset terhadap total aset seperti tabel berikut :

Tabel 4. 9 Proporsi kelompok aset terhadap total aset Kota Surabaya

Kategori Aset	% dari Total Aset					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Aset Lancar	4.34%	4.44%	4.27%	3.39%	2.68%	3.82%
Investasi Jangka Panjang	5.24%	5.03%	4.99%	5.02%	4.92%	5.04%
Aset Tetap	89.40%	88.41%	88.31%	90.30%	91.16%	89.52%
Aset Lainnya	1.02%	2.12%	2.43%	1.29%	1.25%	1.62%
Total Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Data Diolah Penulis

#### A. Pemerintah Kota Surabaya

Dari Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa :

1. Rata-rata Aset Lancar Pemerintah Kota Surabaya selama lima tahun (2016-2020) terhadap total aset sebesar 3.82 % dari total aset. Hal ini menandakan bahwa pada periode tersebut keuangan daerah mengalami kondisi *illiquid*, yaitu kondisi dimana aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan total aset yang dimiliki, hal ini dipengaruhi oleh menurunnya kas pada kas daerah Tahun 2019 Rp. 828,232,610,715.78 dan kas 2020 tercatat Rp. 342,164,911,272.53 atau turun 41%.

2. Rata-Rata investasi jangka panjang selama lima tahun (2016-2020) proporsinya terhadap total aset sebesar 5.04%. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah selama periode tersebut kurang gencar untuk melakukan investasi. Khususnya investasi keuangan, ini dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota bukan merupakan entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Meski demikian pada Tahun Anggaran 2020 investasi jangka panjang Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2,258,363,247,728.09 ini lebih tinggi dari Tahun Anggaran 2019 yang hanya sebesar Rp. 2,241,415,052,935.65, atau naik 1%. Jika dilihat kembali *Prosentase* kenaikan terbesar terjadi pada Tahun Anggaran 2019 dimana naik 5% dari Tahun Anggaran 2018.

3. Rata-rata aset tetap Pemerintah Kota Surabaya selama lima tahun (2016-2020) terhadap total Aset sebesar 89.52%. hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya terus berusaha mengurangi proporsi aset tetapnya, karena semakin tinggi *Prosesntase* aset tetap yang dimiliki akan mengganggu

likuiditas keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini disebabkan oleh aset tetap termasuk kategori tidak *liquid*, karena membutuhkan waktu untuk proses penjualan, dan lain sebagainya sehingga tidak bisa segera digunakan. Namun demikian, aset tetap Pemerintah Daerah dari Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2020 terus mengalami kenaikan, dimana Tahun Anggaran 2016 nilainya sebesar Rp. 34,091,813,049,456.00 dan pada Tahun Anggaran 2020 nilainya sebesar Rp. 41,849,970,098,415.3.

4. Rata-rata aset lainnya Pemerintah Kota Surabaya selama lima tahun (2016-2020) terhadap total aset sebesar 1,62% *Prosentase* ini sangat baik karena semakin kecil nilainya maka semakin tidak mengganggu tingkat likuiditas. Penurunan pada pos Aset Lainnya yang *signifikan* terjadi pada Tahun Anggaran 2019 dari 2.43% pada Tahun Anggaran 2018 menjadi 1.29%, hal ini disebabkan oleh penurunan -54% pada pos Aset Lain-lain

Tabel 4. 10 Proporsi kelompok aset terhadap total aset Kota Malang

Kategori Aset	% dari Total Aset					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Aset Lancar	6.59%	9.00%	9.35%	13.46%	10.88%	9.86%
Investasi Jangka Panjang	4.53%	6.67%	5.10%	5.86%	5.97%	5.63%
Aset Tetap	86.70%	80.99%	83.17%	78.30%	81%	82.03%
Aset Lainnya	2.18%	3.35%	2.38%	2.38%	2.15%	2.49%
Total Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Data Diolah Penulis

## B. Pemerintah Kota Malang

Dari tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa.

1. Rata-rata aset lancar selama lima tahun (2016-2020) proporsinya terhadap total aset sebesar 9.86% dari total aset. Hal ini ideal karena keuangan daerah tidak *overliquid* dan juga tidak *illiquid*. Dimana *Prosentase* aset lancar Pemerintah Daerah tidak lebih dari 10% dari Total Aset yang dimiliki.

2. Rata-rata investasi jangka panjang selama lima tahun (2016-2020) proporsinya terhadap total aset sebesar 5.63% ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah selama periode tersebut kurang gencar untuk melakukan investasi. Khususnya investasi keuangan, ini dapat dipahami Karena Pemerintah Kota bukan merupakan entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Dapat dilihat bahwa selama Tahun Anggaran 2018-2020 insvestasi jangka panjang Pemerintah Daerah terus mengalami peningkatan dimana pada Tahun Anggaran 2018 nilainya 5.10%, dan Pada Tahun Anggaran 2020 nilainya 5.97%. ini terjadi karena terjadi peningkatan pada pos penyertaan modal Pemerintah Daerah.

3. Rata-rata aset tetap selama lima tahun (2016-2020) proporsinya terhadap total aset sebesar 82.03% dari total aset. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah pada periode tersebut terus menjaga jumlah aset tetapnya agar tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Hal ini disebabkan jika *Prosentase* aset tetap Pemerintah Daerah terlalu besar maka akan mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah itu sendiri. Namun dapat dilihat bahwa selama lima Tahun Anggaran Aset tetap Pemerintah Daerah selalu *Prosentase*-nya diatas 80% hanya pada Tahun Anggaran 2019 nilainya 78.30% ini disebabkan oleh menurunnya



jumlah aset tetap yang hanya senilai Rp. 5,004,550,809,144.19 dimana nilai ini terendah selama lima Tahun Anggaran.

4. Rata-rata aset lainnya Pemerintah Kota Malang selama lima tahun (2016-2020) terhadap total aset sebesar 2.49% dimana semakin kecil *Prosentasenya* maka semakin tidak mengganggu tingkat likuiditas keuangan Pemerintah Daerah. Namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan aset lainnya dari 2.18% pada Tahun Anggaran 2016 menjadi 3.35% pada Tahun Anggaran 2017, ini disebabkan oleh meningkatnya aset tak berwujud sebesar 15% dan meningkatnya aset lain-lain sebesar 498%.

Tabel 4. 11 Proporsi kelompok aset terhadap total aset Kabupaten Malang

Kategori Aset	% dari Total Aset					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Aset Lancar	5.84%	7%	7.58%	8.02%	7.81%	7%
Investasi Jangka Panjang	3.33%	3.62%	3.82%	4.10%	4.36%	3.85%
Aset Tetap	90.15%	88.94%	87.43%	86.48%	87.31%	88.06%
Aset Lainnya	0.68%	0.67%	0.65%	0.61%	0.52%	0.63%
Total Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Data Diolah Penulis

### C. Pemerintah Kabupaten Malang

Dari tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa

1. Rata-rata aset lancar selama lima tahun (2016-2020) proporsinya terhadap aset sebesar 7% dari total aset, hal ini ideal Keuangan Daerah tidak *Overliquid* dan juga tidak *Illiquid*. Dimana *Prosentase* aset lancar Pemerintah Daerah tidak lebih dari 10% dari Total Aset yang dimiliki.

2. Rata-rata investasi jangka panjang selama lima tahun (2016-2020) proporsinya terhadap total aset sebesar 3.85%, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah kurang gencar melakukan kegiatan investasi khususnya dibidang keuangan. Hal ini dapat dipahami karena Pemerintah Kota bukan sebuah entitas bisnis yang berorientasi terhadap keuangan. Dapat dilihat bahwa *Prosentase* Aset Lancar selama lima tahun anggaran yang paling tinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 8.02% ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar 7.58% dan Tahun Anggaran 2020 sebesar 7.81%.

3. Rata-rata aset tetap selama lima tahun (2016-2020) proporsinya terhadap total aset sebesar 88.06% dari total aset. Ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah pada periode tersebut terus menjaga jumlah aset tetapnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Karena jika *Prosentase* aset tetap pemerintah daerah terlalu besar maka akan mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Selama lima Tahun Anggaran 2016-2020 *Prosentase* tertinggi proporsi aset terjadi pada Tahun Anggaran 2016 yaitu 90,15%, ini dipengaruhi oleh kelompok aset lain nya memiliki nilai yang lebih kecil dari aset tetap Pemerintah Daerah

4. Rata-rata aset lainnya Pemerintah Kota Malang selama lima tahun (2016-2020) terhadap total aset sebesar 0.63% dimana semakin kecil *Prosentasenya* maka semakin tidak mengganggu tingkat likuiditas keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 12 Proporsi kelompok aset terhadap total aset Kota Batu

Kategori Aset	% dari Total Aset					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Aset Lancar	7.03%	10.79%	16.15%	18.53%	16.24%	13.75%
Investasi Jangka Panjang	1.38%	1.54%	1.57%	1.71%	1.83%	1.61%
Aset Tetap	88.47%	85%	80.30%	77.96%	80.30%	82.41%
Aset Lainnya	3.12%	2.67%	1.98%	1.80%	1.63%	2.24%
Total Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Data Diolah Penulis

#### D. Pemerintah Kota Batu

Dari tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa

1. Rata-rata aset lancar selama lima tahun (2016-2020) proporsinya terhadap total aset sebesar 13.75% hal ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan daerah tidak mengalami *overliquid* atau *illiquid*. Namun harus menjadi perhatian khusus karena *Prosentase* nya mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2019.2.

2. Rata-rata investasi jangka panjang selama lima tahun (2016-2020) proporsinya terhadap total aset sebesar 1.61%, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah kurang gencar melakukan kegiatan investasi khususnya dibidang keuangan. Hal ini dapat dipahami karena Pemerintah Kota bukan sebuah entitas bisnis yang berorientasi terhadap keuangan. 3.

3. Rata-rata aset tetap selama lima tahun (2016-2020) proporsinya terhadap total aset sebesar 82.41% dari total aset. Ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah pada periode tahun anggaran tersebut terus menjaga jumlah aset tetapnya agar tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Karena jika *Prosentase* aset tetap pemerintah daerah terlalu besar maka akan mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

4. Rata-rata aset lainnya Rata-rata aset lainnya Pemerintah Kota Malang selama lima tahun (2016-2020) terhadap total aset sebesar 2.24% dimana semakin kecil *Prosentasenya* maka semakin tidak mengganggu tingkat liquiditas keuangan Pemerintah Daerah

#### 4.1.2 Analisis Kewajiban dan Ekuitas

Tabel 4. 14 Analisis Kewajiban dan Ekuitas Kota Surabaya

Uraian	Tahun Anggaran					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	1.07%	1.52%	1.35%	1.47%	1.42%	1.37%
Rasio Utang Terhadap PAD	10.00%	12.00%	11.00%	12.00%	15.00%	12.00%

Data Dioalah Penulis

Dari tabel 4.14 diketahui bahwa rata-rata rasio utang Pemerintah Daerah terhadap Ekuitas selama lima Tahun Anggaran (2016-2020) *Prosentase-Nya* yang hanya sebesar 1.37% tidak membebani Keuangan Daerah. Sedangkan rasio utang terhadap PAD nilainya sebesar 12% dikhawatirkan membebani Keuangan Daerah.

Tabel 4. 13 Analisis Kewajiban dan Ekuitas Kota Malang

Uraian	Tahun Anggaran					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	0.88%	0.21%	0.22%	0.19%	0.20%	0.34%
Rasio Utang Terhadap PAD	10.84%	2.21%	2.50%	2.17%	2.64%	4.07%

Data Diolah Penulis

Dari tabel 4.16 diketahui bahwa rata-rata rasio utang Pemerintah Daerah terhadap Ekuitas selama lima Tahun Anggaran (2016-2020) *Prosentase-Nya* yang hanya sebesar 0.34% tidak membebani Keuangan Daerah. Sedangkan rasio utang terhadap PAD nilainya sebesar 4.07% dikhawatirkan sedikit membebani Keuangan Daerah.

Tabel 4. 14 Analisis Kewajiban dan Ekuitas Kabupaten Malang

Uraian	Tahun Anggaran					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	0.45%	0.58%	0.60%	0.58%	0.87%	0.62%
Rasio Utang Terhadap PAD	4.90%	4.97%	7.15%	6.46%	10.29%	6.75%

Data Diolah Penulis

Dari tabel 4.17 diketahui bahwa rata-rata rasio utang Pemerintah Daerah terhadap Ekuitas selama lima Tahun Anggaran (2016-2020) *Prosentase-Nya* yang hanya sebesar 0.62 % tidak membebani Keuangan Daerah. Sedangkan rasio utang terhadap PAD nilainya sebesar 6.75% dikhawatirkan sedikit membenani Keuangan Daerah.

Tabel 4. 15 Analisis Kewajiban dan Ekuitas Kota Batu.

Uraian	Tahun Anggaran					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	0.06%	0.57%	0.65%	0.42%	0.50%	0.44%
Rasio Utang Terhadap PAD	0.85%	6.65%	7.64%	4.59%	7.13%	5.37%

Data Diolah Penulis

Dari tabel 4.18 diketahui bahwa rata-rata rasio utang Pemerintah Daerah terhadap Ekuitas selama lima Tahun Anggaran (2016-2020) *Prosesntasi*-Nya yang hanya sebesar 0.44% hal ini tidak membenani Keuangan Daerah. Sedangkan rasio utang terhadap PAD nilainya sebesar 5.37% dikhawatirkan sedikit membenai Kuangan Daerah.

Berdasarkan pada lampiran Neraca 4.1 – 4.4 Laporan Neraca Pemerintah Daerah (Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Kota Batu) diperoleh hasil analisis pertumbuhan Kewajiban sebagai berikut :

#### A. Pemerintah Kota Surabaya

Dari lima Tahun Anggaran ( Tahun Anggaran 2016 – Tahun Anggaran 2020) *Prosentase* Pertumbuhan Kewajiban yang mengalami kenaikan *Signifikan* terjadi pada Tahun Anggaran 2017 yaitu naik sebesar 53% dari Tahun Anggaran sebelumnya hal ini disebabkan kenaikan pada pos Utang Belanja naik 45% dari Tahun Anggaran sebelumnya dan pendapatan diterima dimuka naik 84% dari Tahun Anggaran sebelumnya. Dimana Utang Belanja sebesar Rp. 102,546,820,693.00 terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp 14,731,017.181 Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 34,639,847,512 dan yang tersebar adalah Utang Belanja barang jasa sebesar Rp. 53,175,956,000 merupakan modal pengadaan Tanah yang belum terealisasikan pada Dinas PU Bina Marga dan Pematusan. Untuk Pendapatan Diterima Dimuka kenaikan nya sangat *signifikan* diterima dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sebesar Rp. 426,706,326,103.38 pada tahun 2017 dan Rp. 232,232,865,673.95 pada tahun 2016, ini menandakan Pemerintah Daerah.

## B. Pemerintah Kota Malang

Dari lima Tahun Anggaran ( Tahun Anggaran 2016 – Tahun Anggaran 2020) *Prosentase* Pertumbuhan Kewajiban yang mengalami kenaikan *Signifikan* terjadi pada Tahun Anggaran 2016 yaitu naik sebesar 125% dari Tahun Anggaran sebelumnya hal ini disebabkan kenaikan pada pos Utang Belanja naik 143% dari Tahun Anggaran sebelumnya dan pendapatan diterima dimuka naik 20% dari Tahun Anggaran sebelumnya. Kenaikan utang belanja bersumber dari Utang Belanja Modal DAK untuk pembangunan jalan & konstruksi. Sedangkan pendapatan diterima dimuka merupakan hasil atau pendapatan atas sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Malang yang telah diterima pembayarannya namun masih belum diakui sebagai pendapatan karena belum menjadi hak Pemerintah Kota Malang pada periode berkenaan.

## C. Pemerintah Kabupaten Malang.

Dari lima Tahun Anggaran ( Tahun Anggaran 2016 – Tahun Anggaran 2020) *Prosentase* Pertumbuhan Kewajiban yang mengalami kenaikan *Signifikan* terjadi pada Tahun Anggaran 2017 dan 2020. Dimana Tahun 2017 Kewajiban Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp. 36,929,271,228.49 dan Pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 24,618,795,271.86 naik sebesar 50%. dan pada Tahun Anggaran 2020 Kewajiban Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp. 60,059,357,184.13 dan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 40,303,336,182.92 naik sebesar 49%. Pada Tahun Anggaran 2020 peningkatan Kewajiban disebabkan oleh meningkatnya utang jangka pendek lainnya sebesar 119% dan meningkatnya Utang

Beban Pemerintah Kabupaten Malang sebesar 40%. Kenaikan 40% pada Utang Beban disebabkan besarnya utang beban pada BLUD Puskesmas Kabupaten Malang dan bagi hasil pajak.

#### D. Pemerintah Kota Batu

Dari lima Tahun Anggaran ( Tahun Anggaran 2016 – Tahun Anggaran 2020) *Prosentase* Pertumbuhan Kewajiban yang mengalami kenaikan *Signifikan* terjadi pada Tahun Anggaran 2017. Dimana pada Tahun Anggaran 2017 kewajiban Pemerintah Kota Batu Pada Tahun 2016 sebesar Rp. 935,773,805.33 dan Pada Tahun 2017 sebesar Rp. 9,942,085,255.66 naik sebesar 962%. Hal ini disebabkan oleh Utang Belanja Pemerintah Kota Batu mengalami kenaikan sebesar Rp. 7,091,737,578 dari Rp. 24,816,000.00 pada tahun 2016 menjadi Rp. 7,116,553,578.00 pada tahun 2017. dan Utang jangka pendek lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,966,490,539.00 atau naik 253%. Dimana kenaikan Utang Belanja Pemerintah Kota Batu disebabkan pada Tahun Anggaran 2017 adanya pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya untuk badan keuangan daerah dan juga adanya kurang bayar pemberian tambahan penghasilan Tahun Anggaran 2017. Untuk kenaikan Utang jangka Pendek lainnya disebabkan oleh pembangunan pasar Kota Batu Tahap 1



### 4.1.3 Analisis Realisasi Pendapatan Dan Belanja

Untuk menilai Kinerja Keuangan dapat dilakukan dengan cara menghitung Rasio-rasio keuangan Pemerintah Daerah/Kota. Berdasarkan data pada lampiran 4.5 – 4.8 tentang laporan realisasi anggaran dapat diperoleh rasio keuangan sebagai berikut :

Tabel 4. 16 Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Surabaya

Uraian	%					Rata-Rata	Kategori
	2020	2019	2018	2017	2016		
Rasio Kemandirian	157%	129%	167%	183%	150%	157%	Tinggi
Rasio Ketergantungan	33%	35%	36%	35%	40%	36%	Rendah
Derajat Desentralisasi	52%	46%	61%	64%	60%	57%	Sedang
Rasio Efektivitas PAD	85%	77%	113%	171%	104%	110%	Sangat Efektif
Rasio Efektivitas Pajak	87%	100%	106%	110%	107%	102%	Sangat Efektif
Derajat kontribusi BUMD	1%	6%	3%	2%	3%	3%	Sangat Kurang

Data Diolah Penulis

#### A. Pemerintah Kota Surabaya

1. Rata-rata *Prosentase* Rasio Kemandirian selama lima tahun anggaran (2016-2020) sebesar 157%. Dan masuk dalam kategori tinggi, dimana semakin tinggi *prosentase* dari rasio ini maka semakin tinggi kemandirian Pemerintah Daerah. Dimana hal tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mampu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. ditunjukkan dengan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp. 4,289,960,292,372.98 dan pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp. 2,725,829,859,924.00.

2. Rata-rata *Prosentase* Rasio Ketergantungan selama lima tahun (2016-2020) sebesar 36% dimana semakin rendah *Prosentase* ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak bergantung pada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat, ditunjukkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2020 sebesar Rp. 2,725,829,859,924.00. dan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2020 sebesar Rp. 8,251,513,787,281.00.

3. Rata-rata *Prosentase* Derajat Desentralisasi selama lima tahun (2016-202) sebesar 52% atau dalam kategori sedang, dimana semakin tinggi *Prosentase* nya menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Desentralisasi.

4. Rata-rata *Prosentase* Efektivitas PAD selama lima tahun (2016-2020) sebesar 110% dimana hal tersebut masuk dalam kategori sangat efektif, dimana Pemerintah Daerah mampu memobilisasi PAD sesuai yang dianggarkan. Namun perlu diperhatikan bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Rasio ini memiliki *Prosentase* yang rendah dari lima tahun anggaran sebelumnya yaitu 85%. Hal ini ditunjukkan dengan tidak tercapainya Anggaran Penerimaan PAD dimana Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5,035,094,239,075.00 sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 4,289,960,292,372.98. hal ini disebabkan oleh tingkat pencapaian Pajak Daerah pada Tahun 2020 hanya teralisasi sebesar 86,92% dan pada pos lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terealisasi 86,58%.

5. Rata-rata *Prosentase* efektivitas Pajak Daerah selama tahun (2016-2020) adalah 102% atau masuk pada kategori sangat efektif. Dimana selama Tahun

Anggaran 2016-2019 *Prosentase* rasio ini selalalu diatas 100% ini menunjukkan bawah Pemerinta Kota Surabaya mampu mengoptimalkan sumber-sumber pajak daerah, seperti program penghapusan atau keringanan denda pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, pajak reklame, dan pajak lainnya, Sehingga masyarakat atau pengusaha tertarik memenuhi kewajibannya membayar pajak. Namun pada Tahun Anggaran 2020 *Prosentase* rasionya turun menjadi 87%. Hal ini bisa diakibatkan oleh pandemi covid 19 dimana banyak hotel, restoran, dan hiburan tidak beroperasi, sehingga pemilik reklame keberatan dan menunda pengurusan perpanjangan pajak reklame, pendapatan pajak parkir tidak ada.

6. Rata-rata *Prosentase* derajat kontribusi BUMD adalah 3% atau masuk kategori sangat kurang. Dimana hal ini bisa dipahami karena Pemerintah Daerah bukan organisasi bisnis yang berorientasi pada keuntungan namun Pemerintah Daerah merupakan organisasi sektor publik.

Tabel 4. 17 Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Malang

Uraian	%					Rata-Rata	Kategori
	2020	2019	2018	2017	2016		
Rasio Kemandirian	36%	38%	39%	43%	38%	39%	Rendah
Rasio Ketergantungan	70%	70%	69%	70%	72%	70%	Sangat Tinggi
Derajat Desentralisasi	25%	27%	27%	30%	27%	27%	Cukup
Rasio Efektivitas PAD	92%	96%	105%	114%	166%	115%	Sangat Efektif
Rasio Efektivitas Pajak	83%	92%	103%	114%	124%	103%	Sangat Efektif
Derajat kontribusi BUMD	7%	5%	4%	3%	3%	4%	Sangat Kurang

Data Diolah Penulis

## B. Pemerintah Kota Malang

1. Rata-rata *Prosentase* Rasio Kemandirian selama lima tahun anggaran (2016-2020) sebesar 39%. Dan masuk dalam kategori rendah, dimana semakin rendah *prosentase* dari rasio ini maka semakin rendah tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Dimana hal tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Malang belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Dimana pada Tahun Anggaran 2020 *Prosentase* rasio kemandirian menjadi yang terendah selama lima tahun anggaran (2016-2020) dimana Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp 491,189,243,955.35 dan pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp. 1,374,144,565,833.

2. Rata-rata *Prosentase* Rasio Ketergantungan selama lima tahun (2016-2020) sebesar 70% dan masuk dalam kategori Sangat tinggi dimana semakin tinggi *Prosentase* ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang semakin bergantung pada Transfer Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat, ditunjukkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1,374,144,565,833.00. dan Total Pendapatan Daerah Pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1,956,090,185,104.35.

3. Rata-rata *Prosentase* Derajat Desentralisasi selama lima tahun (2016-2020) sebesar 42% atau dalam kategori baik, dimana semakin tinggi *Prosentase* nya menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Desentralisasi.

4. Rata-rata *Prosentase* Efektivitas PAD selama lima tahun (2016-2020) sebesar 115% dimana hal tersebut masuk dalam kategori sangat efektif, dimana Pemerintah Daerah mampu memobilisasi PAD sesuai yang dianggarkan. Namun perlu diperhatikan bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Rasio ini memiliki *Prosentase* yang rendah dari lima tahun anggaran sebelumnya yaitu 92%. Hal ini ditunjukkan dengan tidak tercapainya Anggaran Penerimaan PAD Tahun 2020 dimana Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 532,371,417,403.28 sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 491,189,243,955.35. hal ini disebabkan oleh tingkat pencapaian Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2020 hanya teralisasi sebesar 82.77%, dimana sektor penurunan pendapatan pajak daerah terdapat pada pajak Hiburan, Pajak Reklame dan pajak hotel.

5. Rata-rata *Prosentase* efektivitas Pajak Daerah selama tahun (2016-2020) adalah 103% atau masuk pada kategori sangat efektif. Dimana semakin tinggi *Prosentase* rasio ini menunjukkan bahwa Pemerinta Kota Malang Efektif dan Optimal dalam memanfaatkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah. Namun Pada Tahun Anggaran 2020 *Prosesntase* rasio ini hanya sebesar 83% dimana penurunan realisasi terjadi pada pajak hiburan hanya terealisasi sebesar 54,21%, Pajak Reklame sebesar 68,9%, PBB sebesar 69,60% dan pajak hotel hanya terealisasi 74.32% Hal ini bisa diakibatkan oleh pandemi covid 19 dimana banyak hotel, restoran, dan hiburan tidak beroperasi, sehingga masyarakat dan perusahaan menunda melaksanakan kewajiban perpajakannya.

6. Rata-rata *Prosentase* derajat kontribusi BUMD adalah 4% atau masuk kategori sangat kurang. Dimana hal ini bisa dipahami karena Pemerintah Daerah

bukan organisasi bisnis yang berorientasi pada keuntungan namun Pemerintah Daerah merupakan organisasi sektor publik.

Tabel 4. 18 Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Malang

Uraian	%					Rata-Rata	Kategori
	2020	2019	2018	2017	2016		
Rasio Kemandirian	23%	21%	39%	43%	38%	33%	Rendah
Rasio Ketergantungan	67%	71%	69%	70%	72%	70%	Sangat Tinggi
Derajat Desentralisasi	15%	15%	27%	30%	27%	23%	Cukup
Rasio Efektivitas PAD	114%	104%	105%	114%	123%	112%	Sangat Efektif
Rasio Efektivitas Pajak	131%	112%	103%	114%	124%	117%	Sangat Efektif
Derajat kontribusi BUMD	3%	3%	3%	3%	1%	3%	Sangat Kurang

Data Diolah Penulis

### C. Pemerintah Kabupaten Malang

1. Rata-rata *Prosentase* Rasio Kemandirian selama lima tahun anggaran (2016-2020) sebesar 33%. Dan masuk dalam kategori rendah, dimana semakin rendah *prosentase* dari rasio ini maka semakin rendah tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Dimana hal tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Malang belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Dimana pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 *Prosentase* rasio kemandirian menjadi yang terendah selama lima tahun anggaran (2016-2020) dimana Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp. 583,846,309,201.31 dan pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp. 2,563,781,806,127.

2. Rata-rata *Prosentase* Rasio Ketergantungan selama lima tahun (2016-2020) sebesar 70% dan masuk dalam kategori Sangat tinggi dimana semakin tinggi *Prosentase* ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang semakin bergantung pada Transfer Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat, ditunjukkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2020 sebesar Rp. 2,563,781,806,127. dan Total Pendapatan Daerah Pada Tahun 2020 sebesar Rp. 3,813,127,410,434.31.

3. Rata-rata *Prosentase* Derajat Desentralisasi selama lima tahun (2016-2020) sebesar 23% atau dalam kategori Cukup, dimana semakin tinggi *Prosentase* nya menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Desentralisasi.

4. Rata-rata *Prosentase* Efektivitas PAD selama lima tahun (2016-2020) sebesar 112% dimana hal tersebut masuk dalam kategori sangat efektif, dimana Pemerintah Daerah mampu memobilisasi PAD sesuai yang dianggarkan. Dapat dilihat selama lima tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Malang *Prosentase* Efektivitas PAD nya selalu diatas 100%, ini menandakan Pemerintah Kabupaten Malang terukur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sejalan dengan *prosesntase* Rasio Efektivitas Pajak Daerah yang sangat efektif.

5. Rata-rata *Prosentase* efektivitas Pajak Daerah selama tahun (2016-2020) adalah 117% atau masuk pada kategori sangat efektif. Dimana semakin tinggi *Prosentase* rasio ini menunjukkan bawah Pemerinta Kabupaten Malang sangat Efektif dan Optimal memanfaatkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah. Pada Tahun Anggaran 2020 *Prosesntase* rasio ini sebesar 131% dimana menjadi yang

tertinggi selama lima tahun (2016-2020) hal ini disebabkan oleh target pendapatan pajak daerah pada tahun 2020 hanya sebesar Rp. 213,423,890,327.70 sementara realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 sebesar Rp. 298,231,998,749.54.

6. Rata-rata *Prosentase* derajat kontribusi BUMD adalah 3% atau masuk kategori sangat kurang. Dimana hal ini bisa dipahami karena Pemerintah Daerah bukan organisasi bisnis yang berorientasi pada keuntungan.

Tabel 4. 19 Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Batu

Uraian	%					Rata-Rata	Kategori
	2020	2019	2018	2017	2016		
Rasio Kemandirian	19%	23%	20%	21%	16%	20%	Rendah Sekali
Rasio Ketergantungan	82%	80%	82%	82%	86%	82%	Sangat Tinggi
Derajat Desentralisasi	15%	19%	17%	18%	14%	16%	Kurang
Rasio Efektivitas PAD	123%	115%	113%	102%	93%	109%	Sangat Efektif
Rasio Efektivitas Pajak	129%	123%	124%	102%	94%	115%	Sangat Efektif
Derajat kontribusi BUMD	2%	2%	1%	2%	2%	2%	Sangat Kurang

Data Diolah Penulis

#### D. Pemerintah Kota Batu

1. Rata-rata *Prosentase* Rasio Kemandirian selama lima tahun anggaran (2016-2020) sebesar 20%. Dan masuk dalam kategori rendah Sekali, dimana semakin rendah *prosentase* dari rasio ini maka semakin rendah tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. hal tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Malang belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Dimana pada Tahun Anggaran 2020 dan 2016 *Prosentase* rasio kemandirian menjadi yang



terendah selama lima tahun anggaran (2016-2020) dimana Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp. 136,766,373,974.97 dan pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp. 732,316,780,356.00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 Pendapatan Asli Daerah tercatat sebesar Rp. 109,533,498,033.54 dan pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2016 tercatat sebesar Rp. 693,263,750,014.

2. Rata-rata *Prosentase* Rasio Ketergantungan selama lima tahun (2016-2020) sebesar 82% dan masuk dalam kategori Sangat tinggi dimana semakin tinggi *Prosentase* ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batu sangat bergantung pada Transfer Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat, ditunjukkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2020 sebesar Rp. 732,316,780,356.00 dan Total Pendapatan Daerah Pada Tahun 2020 sebesar Rp. 893,038,839,330.97.

3. Rata-rata *Prosentase* Derajat Desentralisasi selama lima tahun (2016-2020) sebesar 16% atau dalam kategori Kurang, dimana semakin tinggi *Prosentase* nya menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Desentralisasi.

4. Rata-rata *Prosentase* Efektivitas PAD selama lima tahun (2016-2020) sebesar 109% dimana hal tersebut masuk dalam kategori sangat efektif, pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Batu memiliki *Prosentase* Efektivitas PAD Tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 123%, hal ini dipengaruhi oleh Realisasi PAD Pemerintah Kota Batu sebesar Rp. 136,766,373,974.97 Melebihi Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 110,947,791,067. Dimana salah satu fakto pendukung

nya adalah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang mencapai 128.93% dari anggaran. Dimana Anggaran untuk Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 88,979,277,000.00 dan realisasinya sebesar Rp. 114,716,707,009.67. dimana pajak hotel terealisasi 129,09%, pajak restoran terealisasi 140,70%, pajak Hiburan teralisasi 106,95%, Pajak Reklame terealisasi 108,40%, Pajak Penerangan Jalan Terealisasi 104,35%, Pajak Parkir terealisasi 114,21%, Pajak Air Bawah Tanah Terealisasi 126,12%, PBB terealisasi 117,12%, BPHTB terealisasi 157,86%

5. Rata-rata *Prosentase* efektivitas Pajak Daerah selama tahun (2016-2020) adalah 115% atau masuk pada kategori sangat efektif. Dimana semakin tinggi *Prosentase* rasio ini menunjukkan bawah Pemerinta Kota Batu sangat Efektif dan Optimal memanfaatkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah. Pada Tahun Anggaran 2020 *Prosesntase* rasio ini sebesar 129% dimana menjadi yang tertinggi selama lima tahun (2016-2020) hal ini disebabkan oleh target pendapatan pajak daerah pada tahun 2020 hanya sebesar Rp. 88,979,277,000.00 sementara realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 sebesar Rp. 160,164,142,536.

6. Rata-rata *Prosentase* derajat kontribusi BUMD adalah 2% atau masuk kategori sangat kurang. Dimana hal ini bisa dipahami karena Pemerintah Daerah bukan organisasi bisnis yang berorientasi pada keuntungan.

Berdasarkan Lampiran 4.9 – 4.12 tentang Laporan Realisasi Anggaran empat Pemerintah Kota dan Kabupaten (Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Diperoleh hasil analisis varians sebagai berikut :

## A. Pemerintah Kota Surabaya

1. Total Pendapatan Kota Surabaya selama Tahun Anggaran 2016-2019 selalu melebihi Anggaran yang ditetapkan hal ini disebabkan oleh Pemerintah Kota Surabaya setiap tahun nya membuat program-program sebagai upaya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, diantaranya Program insentif Pajak reklame, Insentif pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, ataupun penghapusan biaya balik nama kendaraan. Sementara pada Tahun Anggaran 2020 Realisasi Pendapatan Pemerintah kota surabaya mengalami penurunan sebesar 9% menjadi 91% dari Tahun Anggaran sebelum nya dimana *Prosentase* ini menjadi yang terendah selama Tahun Anggaran 2016-2020.

2. Total belanja Kota Surabaya Selama Tahun Anggaran 2016-2020 menunjukkan kinerja yang baik di tandai dengan realisasi belanja selama 5 Tahun Anggaran (2016-2020) selalu dibawah yang diangkarkan dengan *Prosentase* 89.62%. ini menandakan Pemerintah Daerah berhati-hati dalam mengelola belanjanya dan selalu berusaha melakukan *efisiensi* Anggaran.

3. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah ditinjau dari Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2020 memiliki kinerja yang baik. Namun perlu ada perbaikan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Daerah.

## B. Pemerintah Kota Malang

1. Total Pendapatan Kota Malang selama Tahun Anggaran 2016-2019 selalu melebihi Anggaran yang ditetapkan hal ini disebabkan oleh Pemerintah Kota Malang setiap tahun nya membuat program-program sebagai upaya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, antara lain Program insentif Pajak reklame, Insentif pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, ataupun penghapusan biaya balik nama kendaraan. Sementara pada Tahun Anggaran 2020 Realisasi Pendapatan Pemerintah kota Malang mengalami sedikit penurunan sebesar 2% menjadi 98% dari Tahun Anggaran sebelum nya dimana *Prosentase* ini menjadi yang terendah selama Tahun Anggaran 2016-2020.

2. Total belanja Kota Malang Selama Tahun Anggaran 2016-2020 menunjukkan kinerja yang baik di tandai dengan realisasi belanja selama 5 Tahun Anggaran (2016-2020) selalu dibawah yang dianggarkan dengan *Prosentase* 80.83%. ini menandakan Pemerintah Daerah berhati-hati dalam mengelola belanjanya dan selalu berusaha melakukan *efisiensi* Anggaran. Namun kinerja terbaik Pemerintah Kota Malang terdapat pada Tahun Anggaran 2019 yaitu relasasi belanja sebesar 72%. Meskipun secara *Prosentase* lebih rendah namun hal ini dapat menjadi indikator bahwa Pemerintah Kota Malang kurang baik dalam Penganggaran APBD sehingga Alokasi-Alokasi belanja tidak dapat terelaisasi dengan baik.

3. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah ditinjau dari Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2020 memiliki kinerja yang baik. Namun perlu ada perbaikan dalam penyusunan Anggaran APBD sehingga anggaran belanja yang ditetapkan dapat terserap dengan baik

### C. Pemerintah Kabupaten Malang

1. Total Pendapatan Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2019-2020 selalu melebihi Anggaran yang ditetapkan hal ini disebabkan oleh Anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2020 turun jika dibandingkan Tahun 2019. Ini menandakan Pemerintah Kabupaten Malang sangat baik dalam melakukan proses penganggaran dimana pada Tahun 2020 menurunkan Proyeksi Anggaran disebabkan oleh Pandemi Covid-19, dimana terjadi penurunan di berbagai sektor.

2. Total Belanja Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2016-2020 memiliki nilai rata-rata 92% ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah Menjalankan Fungsi Penganggaran dengan baik dimana Anggaran Belanja yang ditetapkan dapat diserap atau dialokasikan dengan baik.

3. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Malang ditinjau dari Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2020 Memiliki kinerja yang baik namun tetap perlu dilakukan

perbaikan pada sektor Realisasi Belanja, dimana Pemerintah Daerah harus berusaha untuk melakukan penghematan-penghematan diberbagai sektor.

#### D. Pemerintah Kota Batu

1. Total Pendapatan Kota Malang selama Tahun Anggaran 2017-2020 selalu melebihi Anggaran yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh Pemerintah Kota Batu setiap tahun nya membuat program-program sebagai upaya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, antara lain Program insentif Pajak reklame, Insentif pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, penghapusan biaya balik nama kendaraan. Mempermudah ijin investasi, sehingga potensi pajak yang akan diterima akan lebih besar, Sementara pada Tahun Anggaran 2016 Realisasi Pendapatan Pemerintah kota Malang mengalami sedikit penurunan sebesar 3% menjadi 97% dari Tahun Anggaran sebelum nya dimana *Prosentase* ini menjadi yang terendah selama Tahun Anggaran 2016-2020.

2. Total belanja Kota Malang Selama Tahun Anggaran 2016-2020 menunjukkan kinerja yang baik di tandai dengan realisasi belanja selama 5 Tahun Anggaran (2016-2020) selalu dibawah yang diangkarkan dengan rata-rata *Prosentase* 81%. ini menandakan Pemerintah Daerah berhati-hati dalam mengelola belanjanya dan selalu berusaha melakukan *efisiensi* Anggaran. Sedangkan kinerja terbaik Pemerintah Kota Malang terdapat pada Tahun Anggaran 2019 yaitu realisasi belanja sebesar 73%. Meskipun secara *Prosentase* lebih rendah namun hal ini dapat menjadi indikator bahwa

Pemerintah Kota Malang kurang baik dalam Penganggaran APBD sehingga Alokasi-Alokasi belanja tidak dapat terelaisasi dengan baik.

3. Secara umum berdasarkan uraian diatas dari sisi Belanja kinerja Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2020 memiliki kinerja yang baik. Namun dari sisi pendapatan, kinerja anggaran Pemerintah Daerah menunjukkan kinerja yang bagus ditandai dengan Rata-rata *Prosentase* Realisasi Pendapatan dan Daerah sebesar 101%

#### **4.1.3 Analisis Laporan Arus Kas**

Berdasarkan lampiran 4.10 – 4.13 tentang Laporan Arus Kas empat Pemerintah Daerah (Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

Tabel 4. 20 Aliran Kas Kota Surabaya

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Aliran kas operasi	1,461 Triliun	2,62 Triliun	2,40 Triliun	2,35 Triliun	1,09 Triliun	1,98 Triliun
Pertumbuhan	-	1,15 Triliun	(208) Miliar	(56,20) Miliar	(1,25) Triliun	(73,48) Miliar
Aliran kas Investasi	(1,807) Triliun	(2,51) Triliun	(2,41) Triliun	(2,75) Triliun	(1,58) Triliun	(1,71) Triliun
Pertumbuhan	-	(707) Miliar	99,07 Miliar	2,14 Triliun	(1,30) Triliun	45,22 Miliar
Arus kas Transitoris	15,3 Miliar	(8,31) Miliar	2 Miliar	1,33 Miliar	134,77 Miliar	2,10 Miliar
Pertumbuhan	-	(23,68) Miliar	10,32 Miliar	(673,81) Miliar	(1,19) Triliun	(3,046) Miliar
Kenaikan / penurunan arus kas selama periode	(330) Miliar	95,4 Miliar	(3,59) Miliar	(396,52) Miliar	(487,29) Miliar	(224,47) Miliar
Pertumbuhan	-	426 Miliar	(99) Miliar	(39252) Miliar	(91,16) Miliar	(31,30) Miliar

Data Diolah Penulis

#### A. Pemerintah Kota Surabaya

1. Arus kas dari Aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2020 selalu bersaldo positif. Ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Kemandirian dana yang cukup untuk menunjang kegiatan operasional rutin nya, namun pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 1,25 Triliun Rupian dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurun nya Penerimaan pajak daerah dimana pada Tahun 2019 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 4,018,722,251,948.00 dan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 3,276,839,649,341.00 dan juga menurun nya Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dari



tahun 2019 sebesar Rp. 1,099,625,542,091 dan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 677,024,797,455.

2. Aliran Kas dari aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2020 selalu memiliki saldo negatif, ini menandakan bahwa pemerintah daerah pada periode tersebut terus melakukan penambahan jumlah aset tetap yang memiliki nilai lebih besar dibandingkan kas yang di peroleh dari kegiatan penjualan aset tetap. Hal ini untuk menunjang kepentingan masyarakat kota Surabaya seperti Belanja Modal Tanah, Belanja Modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan instalasi belanja modal aset tetap lainnya

3. Arus Kas Transitoris pada Tahun Anggaran 2018 hingga Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah memiliki arus kas Transitoris yang bersaldo Positif, ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya sudah baik, karena pertumbuhan arus kas masuk aktivitas transitoris yang lebih kecil di bandingkan dengan pertumbuhan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya kurang baik ditunjukkan dari pertumbuhan arus kas masuk dari aktivitas transitoris lebih besar besar dibandingkan pertumbuhan arus kas keluar dari aktivitas transitoris.

Tabel 4. 21 Aliran Kas Kota Malang

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Aliran kas operasi	224,98 Miliar	498,48 Miliar	466,32 Miliar	516,73 Miliar	219,59 Miliar	385,22 Miliar
Pertumbuhan	-	273,5 Miliar	(32,16) Miliar	50,40 Miliar	(297,13) Miliar	(1,07) Miliar
Aliran kas Investasi	(236,81) Miliar	(402,89) Miliar	(377,40) Miliar	(263) Miliar	(390,72) Miliar	(334,16) Miliar
Pertumbuhan	-	(166,07) Miliar	25,49 Miliar	114,40 Miliar	(127,72) Miliar	(30,78) Miliar
Arus kas Transitoris	2 Juta	-	-	-	-	400 Ribu
Pertumbuhan	0	(2) Juta	0	0	0	(400) Ribu
Kenaikan / penurunan arus kas selama periode	(22,83) Miliar	95,59 Miliar	88,92 Miliar	(171,12) Miliar	253,4 Miliar	48,79 Miliar
Pertumbuhan	-	118,42 Miliar	(6,66) Miliar	(260,05) Miliar	424,53 Miliar	55,24 Miliar

Data diolah Penulis

## B. Pemerintah Kota Malang

1. Arus kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2019 menunjukkan saldo yang positif dan terus meningkat, ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Malang memiliki cukup dana untuk membiayai kegiatan operasionalna. Namun pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan yang besar dimana pada saldo pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 516,735,717,021.48 dan pada Saldo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 219,597,279,174.41. penurunan ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2020 terjadi

penurunan Arus kas masuk dari aktivitas operasi yaitu, penurunan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

2. Aliran Kas dari aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2020 selalu memiliki saldo negatif, ini menandakan bahwa pemerintah daerah pada periode tersebut terus melakukan penambahan jumlah aset tetap yang memiliki nilai lebih besar dibandingkan kas yang di peroleh dari kegiatan penjualan aset tetap. Hal ini untuk menunjang kepentingan masyarakat Kota Malang seperti Belanja Modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan instalasi belanja modal aset tetap lainnya dan penyertaan modal Pemerintah Daerah<sup>3</sup>.

3. Arus kas Arus Kas Transitoris pada Tahun Anggaran 2018 hingga Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah memiliki arus kas Transitoris yang bersaldo Positif, ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang sudah baik, karena tidak ada defisit dari arus kas masuk Perhitungan Pihak Ketiga dan arus kas keluar Perhitungan Pihak Ketiga. Setelah pemerintah memungut perhitungan pihak ketiga langsung disetor kembali dengan nominal yang sama.

Tabel 4. 22 Aliran Kas Kabupaten Malang

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Aliran kas operasi	580,28 Miliar	894,25 Miliar	865,02 Miliar	824,87 Miliar	472,08 Miliar	727,30 Miliar
Pertumbuhan	-	313,97 Miliar	(29,23) Miliar	(40,14) Miliar	(351,79) Miliar	255,22 Miliar
Aliran kas Investasi	(713,93) Miliar	(789,41) Miliar	(760,24) Miliar	(846,07) Miliar	(523,42) Miliar	(727,61) Miliar
Pertumbuhan	-	(75,47) Miliar	29,17 Miliar	(85,83) Miliar	322,659 Miliar	(203,19) Miliar
Arus kas Transitoris	(1) Miliar	(1) Miliar	(1) Miliar	4,56 Miliar	1 Miliar	513,85 Miliar
Pertumbuhan	-	-	-	5,56 Miliar	(3,56) Miliar	(486,14) Miliar
Kenaikan / penurunan arus kas selama periode	(134,61) Miliar	74,66 Miliar	133,05 Miliar	-	(16,632) Miliar	11,295 Miliar
Pertumbuhan	-	209,28 Miliar	58,38 Miliar	(133,05) Miliar	(16,63) Miliar	27,92 Miliar

Data Diolah Penulis

### C. Pemerintah Kabupaten Malang

1. Arus kas dari Aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2020 selalu bersaldo positif. Ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Kemandirian dana yang cukup untuk menunjang kegiatan operasional rutin nya, namun pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 351,79 Miliar Rupian dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurun nya Penerimaan pajak daerah dimana pada Tahun 2019 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 298,231,998,749.54 dan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 280,725,934,638.67 dan juga menurun nya Retribusi Daerah dimana

pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 44,700,563,225.00 dan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 23,195,929,714.00. dimana secara keseluruhan Penerimaan Arus Kas Masuk pada Tahun Anggaran 2020 lebih rendah dari Tahun Anggaran 2019, dimana Tahun Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp. 3,812,662,408,134.31 dan Pada Tahun Anggaran 2029 tercatat sebesar Rp. 4,105,627,949,084.41

2. Aliran Kas dari aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2020 selalu memiliki saldo negatif, ini menandakan bahwa pemerintah daerah pada periode tersebut terus melakukan penambahan jumlah aset tetap yang memiliki nilai lebih besar dibandingkan kas yang di peroleh dari kegiatan penjualan aset tetap. Hal ini untuk menunjang kepentingan masyarakat Kabupaten Malang seperti Belanja Modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan instalasi belanja modal aset tetap lainnya dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

3. Arus Kas Transitoris pada Tahun Anggaran 2019 hingga Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah memiliki arus kas Transitoris yang bersaldo Positif, ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya sudah baik, karena pertumbuhan arus kas masuk aktivitas transitoris yang lebih kecil di bandingkan dengan pertumbuhan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2018 kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya kurang baik ditunjukkan dari pertumbuhan arus kas masuk dari aktivitas stransitoris lebih besar besar dibandingkan pertumbuhan arus kas keluar dari aktivitas transitoris.

Tabel 4. 23 Aliran Kas Kota Batu

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Aliran kas Operasi	158,13 Miliar	212,88 Miliar	258,61 Miliar	185,49 Miliar	54,143 Miliar	173,85 Miliar
Pertumbuhan	-	54,75 Miliar	45,72 Miliar	(73,11) Miliar	(131,35) Miliar	119,71 Miliar
Aliran kas Investasi	(174,36) Miliar	(146,62) Miliar	(125,40) Miliar	(146,57) Miliar	(95,86) Miliar	(137,76) Miliar
Pertumbuhan	-	27,7 Miliar	21,2 Miliar	(21,17) Miliar	50,70 Miliar	(41,90) Miliar
Arus kas Transitoris	0	0	0	0	0	0
Pertumbuhan	-	-	-	-	-	-
Kenaikan / penurunan arus kas selama periode	(19,23) Miliar	133,19 Miliar	66,26 Miliar	38,92 Miliar	(41,72) Miliar	35,48 Miliar
Pertumbuhan	-	152,42 Miliar	(66,92) Miliar	(27,33) Miliar	(80,64) Miliar	77,20 Miliar

Data Diolah Penulis

#### D. Pemerintah Kota Batu

1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2020 selalu bersaldo positif. Ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Kemandirian dana yang cukup untuk menunjang kegiatan operasional rutin nya, namun pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 131,35 Miliar Rupian dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurun nya Penerimaan pajak daerah dimana pada Tahun 2019 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 160,164,142.536 dan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 114,716,707,009.67 dan juga menurun nya Dana

Alokasi Umum dimana pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 498,377,051.000 dan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 453,338,878,000. dimana secara keseluruhan Penerimaan Arus Kas Masuk pada Tahun Anggaran 2020 lebih rendah dari Tahun Anggaran 2019, dimana Tahun Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp. 989,384,252,988.50 dan Pada Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp. 893,038,839,330.97 dan Arus Kas Keluar mengalami peningkatan ditahun 2020.

2. Aliran Kas dari aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2020 selalu memiliki saldo negatif, ini menandakan bahwa pemerintah daerah pada periode tersebut terus melakukan penambahan jumlah aset tetap. Hal ini untuk menunjang kepentingan masyarakat Kota Batu seperti Belanja Modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan instalasi belanja modal aset tetap lainnya dan penyertaan modal Pemerintah Daerah. Namun pada Tahun Anggaran 2020 terjadi penurunan arus kas keluar dimana pada tahun 2019 tercatat arus kas keluar sebesar Rp. 146,572,144,864.74 dan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 95,865,502,747.61

3. Arus kas Arus Kas Transitoris pada Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah memiliki arus kas Transitoris yang bersaldo 0, ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang sudah baik, karena tidak ada defisit dari arus kas masuk Perhitungan Pihak Ketiga dan arus kas keluar Perhitungan Pihak Ketiga. Setelah pemerintah memungut perhitungan pihak ketiga langsung disetor kembali dengan nominal yang sama.

